

MENYIKAPI BENCANA SEBAGAI FENOMENA SOSIAL TERINTEGRASI

Oleh: Ita Rustiati Ridwan^{*)}

Abstrak

Bencana telah menjadi fenomena sosial karena setiap peristiwa bencana selalu melibatkan manusia di dalamnya. Penyebab bencana memang dapat diidentifikasi baik secara alam maupun perilaku manusia. Akan tetapi segala sesuatu dikatakan bencana karena menimpa kehidupan manusia. Bencana merupakan suatu keniscayaan dan sebagai manusia patut berusaha untuk menyikapi secara positif terhadap penyebab dan dampak yang ditimbulkannya. Setidaknya ada lima implikasi positif dalam menyikapi bencana, yaitu tindakan preventif dan mitigasi, tidak selalu tergantung pada teknologi, bersikap proaktif, dan bersifat otokritik.

Cara pandang seperti ini akan memberikan implikasi bagi kita untuk lebih siap menghadapi bencana karena kita melihatnya sebagai sebuah fenomena sosial yang dapat ditanggulangi. Salah satu masalah sosial adalah kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri telah menjadi bencana bagi kehidupan manusia yang tidak hanya disebabkan oleh bencana alam melainkan juga oleh faktor-faktor yang datang dari masyarakat itu sendiri.

Studi kebencanaan memang perlu mendapatkan porsi yang besar dari beberapa bidang ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pada titik tertentu, "geografi". Dengan demikian, kita semua menjadi manusia yang dapat menyikapi bencana sebagai fenomena sosial yang terintegrasi.

Kata kunci : *bencana, fenomena sosial, kemiskinan.*

1. Pendahuluan

Pernyataan Tifatul Sembiring yang dikutip di beberapa media nasional dan internasional, bahwa bencana adalah akibat dari kerusakan moral. Tak pelak pernyataan ini menuai kontroversi. Lebih lanjut dikatakan bahwa bencana telah menjadi fenomenon sosial. Tentunya pernyataan-pernyataan tersebut sangat beralasan mengingat dampak yang telah dimunculkan akibat bencana telah menghancurkan tatanan atau struktur sosial yang ada. Korban kelaparan, kemiskinan, hilangnya pekerjaan, hingga penyakit sosial yang mengarah pada kriminalitas kerap terjadi di daerah yang tertimpa bencana. Selain itu, banyak pemikiran para ahli yang lebih mengkonsentrasikan analisisnya pada pendekatan ilmu alam daripada pendekatan ilmu sosial.

Selama ini, ketika orang berbicara tentang bencana, terutama bencana tsunami, gempa bumi dan gunung api meletus, seringkali orang mengacu pada ilmu

^{*)} Dra. Ita Rustiati Ridwan, M.Pd., adalah dosen PGSD UPI-Serang Banten.

geologi dan geofisika. Bencana banyak terdomestifikasi dalam spektrum kedua disiplin ilmu tersebut. Padahal kita tahu bahwa objek studi kedua disiplin tersebut adalah bumi. Kalau sudah tahu tentang patahan pada bumi misalnya, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh kedua disiplin ilmu ini dengan patahan tersebut? Yang dapat mereka lakukan adalah peringatan. Selanjutnya adalah persoalan sosial. Pada akhirnya, bencana secara perlahan berubah menjadi fenomena sosial karena pada dasarnya sebuah bencana terjadi jika dan hanya jika menimpa manusia.

Dari beberapa kasus bencana di Indonesia maupun internasional, kita bisa melihat bahwa bencana selalu melibatkan manusia dalam kejadiannya. Problematika dalam kehidupan manusia di masyarakat bukanlah bersifat parsial dimana pemecahannya hanya bisa dilakukan oleh satu pendekatan keilmuan. Demikian halnya dengan masalah bencana yang terjadi menimpa manusia bahwa seharusnya studi kebencanaan memang perlu mendapatkan porsi yang besar dari beberapa bidang ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pada titik tertentu, "geografi".

2. Bencana sebagai Fenomena Sosial

Pandangan literasi Bosman Batubara terhadap bencana sebagai fenomena sosial menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa implikasi positif. *Pertama*, seperti dinyatakan E.L. Quarantelli (1992), tindakan preventif dan mitigasi akan mendapat porsi perhatian lebih dalam bidang kebencanaan. Kalau bencana merupakan manifestasi dari kerentanan dari sebuah sistem sosial, maka yang perlu mendapat prioritas perhatian tentu saja sistem sosial tersebut. Sebagai contoh, apabila karena tinggal di sebuah lokasi yang dekat dengan gunungapi, dan karenanya sebuah komunitas menjadi rentan terhadap bencana gunungapi, maka yang dapat dilakukan adalah menyiapkan komunitas tersebut untuk selalu awas kepada bahaya gunungapi, atau kalau memungkinkan, merelokasinya. Bukan gunungapinya yang dipindah. Sebuah permasalahan sosial harus diselesaikan dengan solusi dan perspektif sosial pula.

Kedua, cara berfikir ini akan membuat kita juga awas terhadap keterbatasan pikiran manusia dan teknologi. Banyak aspek dari perencanaan tentang pembangunan di kawasan yang rentan terhadap bencana melibatkan dimensi teknologi. Padahal, kita tahu bahwa teknologi tak pernah sempurna. Satu penemuan teknologi baru selalu saja diikuti oleh satu permasalahan baru.

Ketiga, kita akan bersikap proaktif ketimbang hanya reaktif. Alih-alih menunggu bencana terjadi, penekanan diberikan pada pemikiran bagaimana nanti kalau bencana terjadi. Dengan demikian, kita dapat mengambil langkah-langkah nyata sebelum sebuah bencana terjadi. Kalau bencana kita anggap sebagai fenomena alam atau fisik belaka, maka kadang-kadang sangat susah untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan terhadap sebuah agen bencana seperti gempa bumi atau tsunami sebelum itu terjadi. Pembandingnya, dengan meletakkan bencana sebagai fenomenon sosial maka tindakan preventif dapat dilakukan. Tidak

mungkin kita mencegah sebuah gempa bumi yang dipicu oleh patahan, akan tetapi kita dapat menjelaskan kepada orang bahwa di tempat tersebut ada patahan.

Keempat, cara berfikir ini akan membuat kita lebih memberikan perhatian ke dalam diri kita sendiri (manusia) ketimbang ke luar (alam). Dalam poin ini, kita dapat melihat bencana bukan sebagai sebuah kekuatan luar yang menimpa sebuah komunitas, tetapi sebagai manifestasi dari ketidaksiagaan dan kekurangwaspadaan komunitas tersebut terhadap kekuatan luar yang destruktif seperti bencana. Dengan demikian, otokritik menjadi sangat relevan dalam hal ini, karena jang-jangan ancaman terbesar itu ada dalam manusia itu sendiri.

Cara pandang seperti ini akan memberikan implikasi bagi kita untuk lebih siap menghadapi bencana karena kita melihatnya sebagai sebuah fenomena sosial yang dapat kita tangani. Cara pandang tersebut hendaknya menjadi perhatian kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat mengingat negeri kita sangat kaya akan potensi bencana, baik yang disebabkan oleh gejala alam maupun manusia dalam masyarakat. Karena itu, sudah menjadi keharusan apabila implikasi lebih lanjut menjadikan mitigasi bencana sebagai salah satu variabel penting dalam rumusan-rumusan kebijakan pembangunan negeri ini ke depan.

3. Bencana Sosial dan Kemiskinan Struktural yang Terintegrasi

Kehidupan sosial budaya suatu masyarakat pada hakikatnya merupakan sistem terbuka yang terus menerus berinteraksi dan berinterdependensi dengan sistem sosial masyarakat lainnya. Dalam dunia yang semakin mengglobal, ketergantungan antar sistem sosial merupakan suatu keniscayaan yang akan selalu saling mempengaruhi dan mendorong terjadinya pertumbuhan, pergeseran, dan perubahan nilai dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan mewarnai cara berpikir dan berperilaku manusia.

Era globalisasi, perkembangan masyarakat beserta kebudayaannya mengalami percepatan. Percepatan perubahan ini berdampak kepada hal-hal berikut : (1) ketergantungan antar kawasan semakin tinggi; (2) perkembangan IPTEK yang makin pesat; (3) perkembangan arus informasi yang makin padat dan cepat, dan (4) tuntutan terhadap peningkatan layanan profesional dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal tersebut diantaranya dalam bidang pendidikan. (Tirtarahardja, 1994).

Globalisasi ditandai pula dengan munculnya berbagai kelompok dalam masyarakat, baik yang bertendensi religi, politik, ekonomi, sosial bahkan kelompok-kelompok kriminal (*baca: gank*). Sepintas dapat dipahami bahwa munculnya kelompok-kelompok tersebut lebih disebabkan tuntutan lingkungan; yang pada akhirnya membutuhkan pola-pola pikir dan tindak tertentu. Huntington (2001:15) menggambarkan bahwa pada akhirnya akan terjadi benturan pada tiap kelompok manusia di muka bumi ini; benturan tersebut bukan lagi terbatas pada aspek sosial, ekonomi, politik ataupun agama, akan tetapi sudah mencapai pada titik peradaban manusia.

Perubahan yang sangat cepat dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat membawa kompleksitas permasalahan dan tantangan. Permasalahan ini mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, nilai, norma, dan agama. Secara

keseluruhan setiap manusia pada segala jenjang usia mendapatkan imbas dari permasalahan tersebut.

Thomas R. Malthus (Moegiadi, 2002) menjelaskan perubahan yang akan terjadi sebagai dampak arus globalisasi dalam aspek sosial budaya masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada berbagai sektor vital kehidupan masyarakat yang meliputi : (1) *lingkungan kehidupan*, pengrusakan lingkungan merupakan salah satu dampak negatif yang sangat parah pada beberapa belahan dunia; termasuk dalam tatanan geografis negara Indonesia. Penggunaan dan pemanfaatan sumber alam yang tidak terencana dengan sitem pengelolaan yang tidak wajar mengakibatkan terjadinya bencana alam yang tidak terkendalikan. Seperti : banjir, tanah longsor, abrasi pantai dan kemarau panjang. Pada bagian dunia yang lain, kemajuan yang dicapai oleh negara-negara industri menimbulkan polusi yang menambah kompleksitas permasalahan lingkungan. Tentunya kejadian ini berdampak secara langsung terhadap sendi-sendi kehidupan sosial budaya masyarakat, yaitu dengan meningkatnya jumlah pesakitan dan merajalelanya hama tikus di tiap-tiap sudut infrastruktur dan lingkungan tempat individu tinggal; dan (2) *sektor sosial ekonomi*, meningkatnya jumlah masyarakat yang miskin, angka pengangguran mengalami peningkatan berbarengan dengan runtuhnya perekonomian bangsa baik dalam bidang migas ataupun non migas sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Di lain pihak, penambahan jumlah pemuda yang berumur di bawah 14 tahun dan orang dewasa di atas 65 tahun tidak berimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat menambah pincang sistem sosial budaya masyarakat. Sistem asuransi kesehatan serta jaminan sosial yang belum memadai menambah kompleksitas permasalahan di sektor sosial. Belum lagi, kelompok-kelompok imigran dengan berbagai alasan (keamanan dan ekonomi) yang semakin banyak jumlahnya menimbulkan pergeseran nilai yang tidak jarang menimbulkan ketegangan, petentangan dan perselisihan yang berbau SARA. Permasalahan sosial budaya masyarakat pada akhirnya berdampak negatif juga terhadap program sanitasi dan kesehatan masyarakat itu sendiri, sehingga mempermudah terjadinya epidemik, seperti HIV/AIDS atau yang terakhir ini menggemparkan dunia yaitu wabah SARS.

Salah satu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat pada saat sekarang adalah kemiskinan. Krisis multidimensi yang terjadi pada bangsa Indonesia lima tahun terakhir ini berimbas kepada keseluruhan sendi-sendi kehidupan, baik aspek psikologis, sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan pendidikan. Kemiskinan menjadi problem bangsa yang tidak dapat dipandang sebelah mata, karena ia bukan satu permasalahan yang mampu diselesaikan dengan menggunakan satu analisis linier, akan tetapi memerlukan analisis multidimensi yang bersifat "total" untuk menyelesaikannya. Permasalahan kemiskinan berdampak secara krusial pada aspek-aspek kehidupan lainnya, khususnya pada sistem pendidikan bangsa yang sekarang ini sedang berusaha untuk bangkit dan mampu bersaing dengan negara-negara lain baik secara regional ataupun internasional.

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial, karena kemiskinan berkaitan erat dengan hubungan antar manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaan yang bersifat normatif (Soekanto, 2001). Lebih lanjut, kemiskinan menjadi masalah sosial, karena dapat mengganggu terhadap kelanggengan dalam masyarakat. Apabila tidak segera ditangani tentunya akan menjadi permasalahan yang kompleks; lebih jauhnya dapat mengganggu terhadap keamanan dan stabilitas bangsa.

Kemisikinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok yang ada disekitarnya dan juga karena ketidakmampuannya dalam memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2001). Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan, dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul kemudian sebagai masalah sosial. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukan ekonomisnya, sehingga mereka mampu mengatakan bahwa apakah dirinya kaya atau miskin. Pada akhirnya kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial, karena menunjukkan perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat secara tegas.

Pada masyarakat yang bersahaja susunan dan organisasinya, mungkin kemiskinan bukan merupakan masalah sosial, karena mereka menganggap bahwa semuanya telah ditakdirkan, sehingga tidak ada usaha untuk mengatasinya. Mereka tidak akan terlalu memperhatikan keadaan tersebut, kecuali apabila mereka betul-betul menderita kerennya. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka membenci kemiskinan adalah kesadaran bahwa mereka telah gagal untuk memperoleh lebih daripada apa yang telah dimilikinya dan perasaan akan adanya ketidakadilan.

Pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu problema sosial karena sikap yang membenci kemiskinan tadi. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang makan, pakaian atau perumahan. Akan tetapi kerana harta miliknya dianggap kurang cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Hal ini tampak sekali dalam kehidupan masyarakat di kota-kota besar Indonesia, seperti : Jakarta, Bandung atau Surabaya. Menurut mereka seseorang dianggap miskin karena tidak memiliki TV, radio, motor atau mobil. Sehingga lama-kelamaan benda-benda sekunder tersebut menjadi ukuran bagi keadaan sosial-ekonomi seseorang, yaitu apakah dia miskin atau kaya.

Kemiskinan secara sosiologis, disebabkan karena salah satu lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik. Kepincangan-kepincangan yang tergambarkan tersebut di atas tentunya akan menjalar ke bidang-bidang kehidupan lainnya (Soekanto, 2001).

Kemisikinan sebagai dampak budaya pada dasarnya merujuk kepada kecenderungan budaya itu sendiri untuk menetap atau berubah (Waridah dkk, 2000). Pada budaya masyarakat tertentu muncul suatu istilah “mangan ngak mangan seng penting kumpul” . Akan tetapi pada sistem masyarakat tertentu muncul suatu budaya bahwa keberkahan hidup akan datang pada saat manusia

mengembara ke tempat yang lain. Sepintas tampak bahwa pada masyarakat yang pertama tidak terlalu penting arti hidup berlebih atau berkecukupan, yang penting orang bisa makan dan minum. Akan tetapi berlainan dengan budaya pada masyarakat ke dua. Pada masyarakat ini hidup berkecukupan menjadi sesuatu yang esensial.

Menurut (Waridah dkk, 2001) diantara faktor-faktor yang memunculkan budaya “nerimo” pada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Sikap pasrah terhadap nasib
- b. Kurang disiplin (kurang menghargai waktu)
- c. Tidak suka bekerja keras
- d. Sikap tidak jujur
- e. Hidup boros
- f. Sikap tertutup terhadap pembaruan (isolasi)

Pola hidup masyarakat yang berkiblat pada aspek-aspek budaya negatif di atas tentunya akan berdampak pada pola pikir dan pola tindak; bahkan cenderung tidak memiliki masa depan. Akibatnya muncul permasalahan sosial; yang paling dominan adalah kemiskinan, baik secara sandang, pangan ataupun papan. Tidak menutup kemungkinan, bahwa sebagai dampak kemiskinan yang mereka alami, lalu mereka terjun dunia kekerasan, kriminal, obat-obat terlarang ataupun dunia prostitusi. Tentunya kondisi yang sedemikian ironis akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang baru.

Marx (Manning, 1985) berpendapat bahwa kaum miskin di kota merupakan kelompok yang berpotensi untuk mengadakan gerakan revolusioner. Alasannya, kemiskinan merupakan dampak akan adanya ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan dalam bidang ekonomi; dan hal tersebut cenderung dikelola oleh penguasa. Analisis aspek ekonomi yang berdampak kepada kemiskinan lebih menunjukkan adanya gaya kehidupan individualis “egois” yang marak terjadi pada kehidupan masyarakat diperkotaan.

James Scott (Damsar,1997), menyatakan bahwa ciri masyarakat perkotaan adalah mereka yang selalu mengalami ketakutan kekurangan pangan, sehingga mereka dengan segala cara berupaya untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kondisi sedemikian pada akhirnya melahirkan bentuk ekonomi kapitalis, yaitu pengelolaan ekonomi hanya dilakukan oleh “segelintir” orang-orang yang memiliki kekuasaan saja.

Granovetter (Damsar, 1997) menjelaskan bahwa hubungan sosial yang harmonis antar kelas dalam masyarakat banyak ditentukan oleh faktor ekonomi. Ungkapan Granovetter menggambarkan suatu analisis terkait dengan upaya ke arah pendistribusian bidang ekonomi secara adil dan merata. Tentunya ketidakmerataan dalam hal ekonomi akan berdampak negatif terhadap tiap-tiap sendi kehidupan masyarakat.

Sikap arogansi dalam menguasai bidang-bidang ekonomi menimbulkan gaya hidup yang konsumtif, kompetisi yang “tidak sehat” dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Penguasaan perekonomian dipusatkan pada pasar-pasar berkelas besar seperti swalayan, ataupun departemen store, yang menyediakan seluruh

kepentingan masyarakat, maka pada saat itu masyarakat yang berekonomi rendah (warung-warung kecil atau pedagang asongan) yang tidak menguasai ekonomi akan menjadi masyarakat yang cenderung terpuruk dan menjadi masyarakat yang miskin, karena mereka tidak mendapatkan peluang ekonomi yang adil. Situasi yang sedemikian pada akhirnya melahirkan oposisi dari masyarakat yang merasa tersisihkan dalam bidang ekonomi hingga terjadinya bentuk kerusuhan ataupun bentrok massal.

Kemiskinan ditinjau melalui analisis aspek politik dimaknai sebagai aspek kekuasaan. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, namun di antara para ilmuwan politik tidak ada kesepakatan mengenai makna kekuasaan. Beberapa diantaranya bahkan menganjurkan agar konsep kekuasaan ditinggalkan karena bersifat kabur dan berkonotasi emosional. Namun, tampaknya politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral.

Dalam setiap situasi, hubungan kekuasaan terdapat tiga unsur yang selalu terkandung didalamnya. Ketiga unsur itu meliputi tujuan, cara penggunaan sumber-sumber pengaruh dan hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh. Kemiskinan yang muncul sebagai dampak politik lebih bertendensi kediktatoran dalam berkuasa yang menyebabkan masyarakat mengalami kemandegan dalam berkegiatan dan kebuntuan dalam berpikir. Dalam hal ini, politik merupakan kekuasaan untuk memaksa, mengeksploitasi, menekan, dominasi dan konflik. Kepentingan yang diusung bukan lagi kepentingan masyarakat luas, akan tetapi kepentingan sekelompok orang saja, maka masyarakat menjadi manusia-manusia yang miskin karena mereka terampas kebebasan, kehidupan, kesenangan dan juga kemanusiaannya.

Surbakti (1999) menjelaskan bahwa sarana kekuasaan yang digunakan untuk mendapatkan ketaatan dengan kekuasaan paksaan berjumlah tiga macam, yaitu sarana kekuasaan paksaan fisik, antara lain berupa senjata yang dipegang oleh polisi dan militer, senjata nuklir, dan senjata modern lainnya yang dimiliki oleh suatu negara. Sarana kekuasaan ekonomi, seperti pekerjaan, uang, proyek, kesempatan berusaha, dan bentuk-bentuk kapital lain yang dapat juga dijadikan sebagai alat untuk memaksa orang lain supaya mentaati apa yang dikehendaki oleh pemilik sarana kekuasaan.

Kehilangan pekerjaan, tidak mendapatkan proyek, tidak mendapatkan izin usaha, dan tidak mendapatkan pinjaman dari bank merupakan bentuk-bentuk paksaan secara ekonomi untuk mendapatkan kekuasaan. Ada juga sarana paksaan secara psikologis, seperti intimidasi, perang urat syaraf dan cuci otak (brain washing) dapat pula digunakan untuk memaksa orang lain agar mentaati apa yang dikehendaki oleh pemilik kekuasaan.

Analisis geografis terhadap kemiskinan di perkotaan khususnya lebih memperhatikan pada aspek urbanisasi berlebih, yaitu suatu keadaan tidak mempunyai kota-kota yang menyediakan fasilitas pelayanan pokok dan kesempatan kerja memadai untuk penduduk yang bertambah dengan pesat. Menurut Manning (1985), terdapat beberapa gejala sosial-ekonomi yang ditimbulkan sebagai dampak urbanisasi, yaitu hal-hal sebagai berikut:

- a. Membengkaknya jumlah penganggur dan setengah penganggur yang semakin besar dan meningkat
- b. Proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri di kota hampir tidak dapat bertambah dan malahan mungkin semakin berkurang
- c. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat sehingga pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan dan transportasi yang memadai.

Sejalan dengan meningkatnya urbanisasi, jumlah orang yang mencari pekerjaan semakin meningkat sedangkan jumlah pekerja yang dibutuhkan semakin sedikit dan persaingan semakin ketat, maka mereka yang berhasil berkompetisilah yang akan menang.

Mereka yang urban dan tidak terserap lapangan pekerjaan akhirnya menjadi pengangguran, mereka cenderung masih muda dan tingkat pengangguran lulusan sekolah menengah dua kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah dan kelompok ini cenderung menganggur relatif lama.

Analisis lain mengungkapkan bahwa tingginya tingkat urban yang menganggur berhubungan erat dengan sistem pendidikan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan kebutuhan dunia pekerjaan. Pada akhirnya semakin tinggi tingkat urbanisasi yang tidak memiliki pekerjaan, akan berdampak juga pada meningkatnya jumlah orang yang mengalami kemiskinan. Dampaknya, tinggi pula tingkat penyimpangan perilaku yang terjadi pada orang-orang urban diperkotaan; tidak sedikit dari mereka akhirnya terjerumus pada tindakan kriminal dan kejahatan.

Selain permasalahan pengangguran, urbanisasipun berdampak kepada rentannya terjadi pergesekan antar nilai-nilai yang dibawa pendatang dengan nilai-nilai yang sudah dipegang secara kuat oleh orang-orang pribumi. Tidak sedikit di negara ini pergesekan antar nilai-nilai tadi mengakibatkan konflik yang besar dan cenderung berkepanjangan. Semakin banyaknya urbanisasipun mengakibatkan semakin sempitnya tempat tinggal, maka akan menjadi rentan terhadap penyebaran penyakit menular dan penyakit psikologis.

4. Penutup

Pada akhirnya kita sepakat bahwasannya bencana yang kerap muncul merupakan fenomena sosial meskipun penyebabnya dapat diidentifikasi baik baik berasal dari faktor alam maupun manusia itu sendiri. Hal ini hendaknya dapat memunculkan pemikiran dan pemahaman yang sama dalam menyikapi bencana sebagai fenomena sosial yang terintegrasi. Karena dampak yang sangat besar akibat bencana selalu bermuara pada permasalahan manusia dalam masyarakat seperti munculnya kemiskinan.

Kemiskinan bukanlah masalah sosial yang bersifat linier. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang dapat berakibat negatif pada sendi-sendi kehidupan manusia dan tidak bersifat lokal tetapi global dan integral dengan setiap aspek kehidupan manusia itu sendiri. Analisis terhadap kemiskinan tidak cukup dengan pendekatan satu aspek tetapi analisis multiaspek karena ia akan berdampak

tidak hanya pada masa kini tetapi memberikan pengaruh juga terhadap kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Kemiskinan itu sendiri telah menjadi bencana bagi kehidupan manusia yang tidak hanya disebabkan oleh bencana alam melainkan juga oleh faktor-faktor yang datang dari masyarakat itu sendiri. Bencana memang sebuah keniscayaan akan tetapi semua itu dapat kita pelajari dan diupayakan sehingga dampaknya dapat diminimalisasi. Studi kebencanaan memang perlu mendapatkan porsi yang besar dari beberapa bidang ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pada titik tertentu, “geografi”. Dengan demikian, kita semua menjadi manusia yang dapat menyikapi bencana sebagai fenomena sosial yang terintegrasi.

Daftar Pustaka

- Bosman Batubara, <http://geologi.iagi.or.id/2010/01/22/bencana-sebagai-fenomenon-sosial/>
- Ancok, J. (2002). *Out Bound Management Training*. Yogyakarta: UII press.
- Damsar (1997). *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manning, C (1985). *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: PT Gramedia.
- Moegiadi (2002). “ Permasalahan dan Tantangan Abad 21 dengan Implikasi Sektor Pendidikan”. *Mimbar Pendidikan. Jurnal Pendidikan*. No. 3 .10-14.
- Rush, M dan Althoff, P (1997) *Pengantar Sosio Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S (2001) *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, R (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Tirtarahardja, U (1999). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Tilaar, HAR (1999). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Tilaar, HAR (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Waridah, S. et al. (2000). *Antropologi*. Jakarta: Bumi Aksara.